



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/KM.7/2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAMBAHAN GELOMBANG III
TAHUN ANGGARAN 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, ketentuan mengenai rincian alokasi BOK Tambahan menurut daerah provinsi/kabupaten/kota, perubahan struktur dan besaran insentif tenaga kesehatan dan tata cara pengelolaan Dana Cadangan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020 selisih antara Total Rincian Alokasi BOK Tambahan dengan Pagu BOK Tambahan dialokasikan sebagai Dana Cadangan BOK Tambahan;
 - c. bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 selisih antara Total Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu Dana Cadangan BOK Tambahan, dialokasikan sebagai Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Covid-19*;
2. Surat Kementerian Kesehatan Nomor DG.02.03/II/1116/2020 Perihal Rekomendasi Kebutuhan Anggaran untuk Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan *Covid-19* di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAMBAHAN GELOMBANG III TAHUN ANGGARAN 2020.

PERTAMA : Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 menurut provinsi/kabupaten/kota diberikan kepada daerah sebagaimana tercantum pada kolom 2 lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan perkiraan alokasi bulan Maret sampai dengan Mei sebagai Insentif Tenaga Kesehatan Daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Penyaluran Dana Cadangan BOK Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan dalam 2 tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi;
- KEEMPAT : Penyaluran Dana Cadangan BOK Tambahan Tahap II sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan setelah Daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan Tahap I yang menunjukkan realisasi pembayaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Dana yang diterima di RKUD.
- KELIMA : Laporan Realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan Tahap I sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Oktober 2020.
- KEENAM : Laporan realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan Tahap I sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT disampaikan dengan menggunakan format laporan realisasi pembayaran Dana BOK Tambahan sebagaimana lampiran PMK 35/PMK.07/2020.
- KETUJUH : Pembayaran insentif dari RKUD kepada tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Selisih antara Total Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dengan Pagu Dana Cadangan BOK Tambahan setelah memperhitungkan Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang II sebagaimana ditetapkan dalam KMK Nomor 14/KM.7/2020 dialokasikan sebagai Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan.
- KESEMBILAN : Penggunaan Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN dilaksanakan sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada Kementerian



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

KESEPULUH : Dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban BOK Tambahan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah, Pemerintah dapat melakukan *post audit* oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
5. Gubernur bersangkutan;
6. Bupati/Wali Kota bersangkutan; dan
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga


DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/KM.7/2020
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN
RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
(BOK) TAMBAHAN GELOMBANG III
TAHUN ANGGARAN 2020

TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAMBAHAN GELOMBANG III
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Provinsi Aceh	1.410.000.000
2	Kab. Aceh Barat	840.000.000
3	Kab. Aceh Besar	1.740.000.000
4	Kab. Aceh Selatan	2.790.000.000
5	Kab. Aceh Singkil	780.000.000
6	Kab. Aceh Tengah	2.370.000.000
7	Kab. Aceh Tenggara	2.430.000.000
8	Kab. Aceh Timur	4.567.500.000
9	Kab. Aceh Utara	3.465.000.000
10	Kab. Bireuen	2.550.000.000
11	Kab. Pidie	4.462.500.000
12	Kab. Simeulue	1.365.000.000
13	Kota Banda Aceh	2.887.500.000
14	Kota Sabang	420.000.000
15	Kota Langsa	1.650.000.000
16	Kota Lhokseumawe	2.467.500.000
17	Kab. Gayo Lues	2.992.500.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.097.500.000
19	Kab. Aceh Jaya	780.000.000
20	Kab. Nagan Raya	2.190.000.000
21	Kab. Aceh Tamiang	1.575.000.000
22	Kab. Bener Meriah	1.470.000.000
23	Kab. Pidie Jaya	720.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
24	Kota Subulussalam	480.000.000
25	Provinsi Sumatera Utara	105.000.000
26	Kab. Asahan	6.510.000.000
27	Kab. Dairi	2.850.000.000
28	Kab. Deli Serdang	5.250.000.000
29	Kab. Karo	5.010.000.000
30	Kab. Labuhanbatu	2.400.000.000
31	Kab. Langkat	4.650.000.000
32	Kab. Mandailing Natal	1.620.000.000
33	Kab. Nias	2.070.000.000
34	Kab. Simalungun	8.610.000.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	1.020.000.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	3.750.000.000
37	Kab. Tapanuli Utara	3.727.500.000
38	Kab. Toba Samosir	3.000.000.000
39	Kota Binjai	1.350.000.000
40	Kota Medan	6.300.000.000
41	Kota Pematang Siantar	5.010.000.000
42	Kota Sibolga	360.000.000
43	Kota Tanjung Balai	1.350.000.000
44	Kota Tebing Tinggi	1.500.000.000
45	Kota Padang Sidempuan	2.782.500.000
46	Kab. Pakpak Bharat	540.000.000
47	Kab. Nias Selatan	2.220.000.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	780.000.000
49	Kab. Serdang Bedagai	3.150.000.000
50	Kab. Samosir	780.000.000
51	Kab. Batu Bara	2.400.000.000
52	Kab. Padang Lawas	1.020.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
53	Kab. Padang Lawas Utara	1.080.000.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.080.000.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	2.850.000.000
56	Kab. Nias Utara	720.000.000
57	Kab. Nias Barat	540.000.000
58	Kota Gunungsitoli	420.000.000
59	Provinsi Sumatera Barat	6.120.000.000
60	Kab. Limapuluh Kota	3.450.000.000
61	Kab. Agam	1.440.000.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2.400.000.000
63	Kab. Padang Pariaman	3.900.000.000
64	Kab. Pasaman	1.020.000.000
65	Kab. Pesisir Selatan	1.260.000.000
66	Kab. Sijunjung	840.000.000
67	Kab. Solok	1.200.000.000
68	Kab. Tanah Datar	3.600.000.000
69	Kota Bukit Tinggi	1.200.000.000
70	Kota Padang Panjang	300.000.000
71	Kota Padang	5.610.000.000
72	Kota Payakumbuh	1.350.000.000
73	Kota Sawahlunto	1.050.000.000
74	Kota Solok	525.000.000
75	Kota Pariaman	840.000.000
76	Kab. Pasaman Barat	3.150.000.000
77	Kab. Dharmasraya	2.250.000.000
78	Kab. Solok Selatan	1.500.000.000
79	Provinsi Riau	4.110.000.000
80	Kab. Bengkalis	5.250.000.000
81	Kab. Indragiri Hilir	7.927.500.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
82	Kab. Indragiri Hulu	3.832.500.000
83	Kab. Kampar	4.987.500.000
84	Kab. Kuantan Singingi	2.850.000.000
85	Kab. Pelalawan	3.202.500.000
86	Kab. Rokan Hilir	2.550.000.000
87	Kab. Rokan Hulu	3.937.500.000
88	Kab. Siak	4.935.000.000
89	Kota Dumai	2.782.500.000
90	Kota Pekanbaru	3.937.500.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	2.782.500.000
92	Provinsi Jambi	1.410.000.000
93	Kab. Batanghari	3.517.500.000
94	Kab. Bungo	3.727.500.000
95	Kab. Kerinci	2.610.000.000
96	Kab. Merangin	4.567.500.000
97	Kab. Muaro Jambi	3.937.500.000
98	Kab. Sarolangun	3.412.500.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.412.500.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.517.500.000
101	Kab. Tebo	3.832.500.000
102	Kota Jambi	3.832.500.000
103	Kota Sungai Penuh	1.260.000.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	7.710.000.000
105	Kab. Lahat	5.197.500.000
106	Kab. Musi Banyuasin	10.680.000.000
107	Kab. Musi Rawas	3.000.000.000
108	Kab. Muara Enim	2.670.000.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	4.777.500.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	4.860.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
111	Kota Palembang	8.310.000.000
112	Kota Prabumulih	3.510.000.000
113	Kota Pagar Alam	1.770.000.000
114	Kota Lubuk Linggau	5.520.000.000
115	Kab. Banyuasin	7.110.000.000
116	Kab. Ogan Ilir	5.910.000.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5.670.000.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	5.010.000.000
119	Kab. Empat Lawang	1.950.000.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3.210.000.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	3.360.000.000
122	Provinsi Bengkulu	1.410.000.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	3.202.500.000
124	Kab. Bengkulu Utara	4.042.500.000
125	Kab. Rejang Lebong	3.937.500.000
126	Kota Bengkulu	3.832.500.000
127	Kab. Kaur	3.412.500.000
128	Kab. Seluma	4.042.500.000
129	Kab. Mukomuko	3.517.500.000
130	Kab. Lebong	2.130.000.000
131	Kab. Kepahiang	3.202.500.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	3.832.500.000
133	Provinsi Lampung	2.760.000.000
134	Kab. Lampung Barat	3.307.500.000
135	Kab. Lampung Selatan	4.462.500.000
136	Kab. Lampung Tengah	5.827.500.000
137	Kab. Lampung Utara	4.567.500.000
138	Kab. Lampung Timur	3.390.000.000
139	Kab. Tanggamus	4.147.500.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
140	Kab. Tulang Bawang	3.622.500.000
141	Kab. Way Kanan	3.727.500.000
142	Kota Bandar Lampung	4.882.500.000
143	Kota Metro	2.992.500.000
144	Kab. Pesawaran	2.992.500.000
145	Kab. Pringsewu	3.097.500.000
146	Kab. Mesuji	2.130.000.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	3.412.500.000
148	Kab. Pesisir Barat	2.887.500.000
149	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	91.620.000.000
150	Provinsi Jawa Barat	10.245.000.000
151	Kab. Bandung	11.460.000.000
152	Kab. Bekasi	8.760.000.000
153	Kab. Bogor	23.340.000.000
154	Kab. Ciamis	5.617.500.000
155	Kab. Cianjur	8.085.000.000
156	Kab. Cirebon	9.555.000.000
157	Kab. Garut	12.210.000.000
158	Kab. Indramayu	8.505.000.000
159	Kab. Karawang	11.670.000.000
160	Kab. Kuningan	7.245.000.000
161	Kab. Majalengka	6.720.000.000
162	Kab. Purwakarta	5.160.000.000
163	Kab. Subang	8.160.000.000
164	Kab. Sukabumi	9.450.000.000
165	Kab. Sumedang	5.407.500.000
166	Kab. Tasikmalaya	5.932.500.000
167	Kota Bandung	15.870.000.000
168	Kota Bekasi	8.460.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
169	Kota Bogor	5.910.000.000
170	Kota Cirebon	5.460.000.000
171	Kota Depok	7.410.000.000
172	Kota Sukabumi	4.410.000.000
173	Kota Tasikmalaya	5.310.000.000
174	Kota Cimahi	4.110.000.000
175	Kota Banjar	2.782.500.000
176	Kab. Bandung Barat	9.120.000.000
177	Kab. Pangandaran	3.307.500.000
178	Provinsi Jawa Tengah	17.850.000.000
179	Kab. Banjarnegara	7.410.000.000
180	Kab. Banyumas	8.010.000.000
181	Kab. Batang	5.310.000.000
182	Kab. Blora	4.462.500.000
183	Kab. Boyolali	4.357.500.000
184	Kab. Brebes	7.860.000.000
185	Kab. Cilacap	7.860.000.000
186	Kab. Demak	6.210.000.000
187	Kab. Grobogan	4.882.500.000
188	Kab. Jepara	5.310.000.000
189	Kab. Karanganyar	3.937.500.000
190	Kab. Kebumen	7.410.000.000
191	Kab. Kendal	4.882.500.000
192	Kab. Klaten	7.260.000.000
193	Kab. Kudus	5.010.000.000
194	Kab. Magelang	6.510.000.000
195	Kab. Pati	6.510.000.000
196	Kab. Pekalongan	6.195.000.000
197	Kab. Pemasang	5.910.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
198	Kab. Purbalingga	5.460.000.000
199	Kab. Purworejo	6.210.000.000
200	Kab. Rembang	3.517.500.000
201	Kab. Semarang	6.060.000.000
202	Kab. Sragen	4.357.500.000
203	Kab. Sukoharjo	3.960.000.000
204	Kab. Tegal	6.510.000.000
205	Kab. Temanggung	5.910.000.000
206	Kab. Wonogiri	5.302.500.000
207	Kab. Wonosobo	5.760.000.000
208	Kota Magelang	2.910.000.000
209	Kota Pekalongan	3.202.500.000
210	Kota Salatiga	3.060.000.000
211	Kota Semarang	7.710.000.000
212	Kota Surakarta	4.710.000.000
213	Kota Tegal	3.360.000.000
214	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1.410.000.000
215	Kab. Bantul	4.567.500.000
216	Kab. Gunung Kidul	4.882.500.000
217	Kab. Kulon Progo	5.565.000.000
218	Kab. Sleman	5.985.000.000
219	Kota Yogyakarta	5.250.000.000
220	Provinsi Jawa Timur	27.960.000.000
221	Kab. Bangkalan	5.460.000.000
222	Kab. Banyuwangi	10.920.000.000
223	Kab. Blitar	5.760.000.000
224	Kab. Bojonegoro	7.560.000.000
225	Kab. Bondowoso	5.910.000.000
226	Kab. Gresik	6.960.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
227	Kab. Jember	9.660.000.000
228	Kab. Jombang	7.260.000.000
229	Kab. Kediri	9.720.000.000
230	Kab. Lamongan	7.110.000.000
231	Kab. Lumajang	5.910.000.000
232	Kab. Madiun	8.070.000.000
233	Kab. Magetan	5.460.000.000
234	Kab. Malang	8.010.000.000
235	Kab. Mojokerto	6.210.000.000
236	Kab. Nganjuk	7.170.000.000
237	Kab. Ngawi	5.760.000.000
238	Kab. Pacitan	5.760.000.000
239	Kab. Pamekasan	5.160.000.000
240	Kab. Pasuruan	7.110.000.000
241	Kab. Ponorogo	4.987.500.000
242	Kab. Probolinggo	9.120.000.000
243	Kab. Sampang	5.310.000.000
244	Kab. Sidoarjo	6.060.000.000
245	Kab. Situbondo	5.160.000.000
246	Kab. Sumenep	6.660.000.000
247	Kab. Trenggalek	4.042.500.000
248	Kab. Tuban	7.110.000.000
249	Kab. Tulungagung	6.960.000.000
250	Kota Blitar	420.000.000
251	Kota Kediri	3.510.000.000
252	Kota Madiun	1.050.000.000
253	Kota Malang	2.550.000.000
254	Kota Mojokerto	3.060.000.000
255	Kota Pasuruan	2.572.500.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
256	Kota Probolinggo	3.060.000.000
257	Kota Surabaya	13.470.000.000
258	Kota Batu	900.000.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	2.100.000.000
260	Kab. Bengkayang	4.710.000.000
261	Kab. Landak	1.785.000.000
262	Kab. Kapuas Hulu	5.610.000.000
263	Kab. Ketapang	4.252.500.000
264	Kab. Mempawah	3.202.500.000
265	Kab. Sambas	6.300.000.000
266	Kab. Sanggau	3.727.500.000
267	Kab. Sintang	3.832.500.000
268	Kota Pontianak	5.610.000.000
269	Kota Singkawang	2.782.500.000
270	Kab. Sekadau	1.365.000.000
271	Kab. Melawi	1.800.000.000
272	Kab. Kayong Utara	945.000.000
273	Kab. Kubu Raya	3.150.000.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	2.100.000.000
275	Kab. Barito Selatan	1.950.000.000
276	Kab. Barito Utara	3.412.500.000
277	Kab. Kapuas	4.050.000.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	4.860.000.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	5.310.000.000
280	Kota Palangkaraya	1.800.000.000
281	Kab. Katingan	2.550.000.000
282	Kab. Seruyan	1.950.000.000
283	Kab. Sukamara	900.000.000
284	Kab. Lamandau	1.800.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
285	Kab. Gunung Mas	2.700.000.000
286	Kab. Pulang Pisau	1.950.000.000
287	Kab. Murung Raya	2.400.000.000
288	Kab. Barito Timur	1.800.000.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	5.175.000.000
290	Kab. Banjar	3.750.000.000
291	Kab. Barito Kuala	3.000.000.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.937.500.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.000.000.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	2.100.000.000
295	Kab. Kotabaru	4.500.000.000
296	Kab. Tabalong	2.850.000.000
297	Kab. Tanah Laut	5.010.000.000
298	Kab. Tapin	2.100.000.000
299	Kota Banjarbaru	3.660.000.000
300	Kota Banjarmasin	6.060.000.000
301	Kab. Balangan	1.950.000.000
302	Kab. Tanah Bumbu	2.250.000.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	4.110.000.000
304	Kab. Berau	3.937.500.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	5.092.500.000
306	Kab. Kutai Barat	3.727.500.000
307	Kab. Kutai Timur	3.937.500.000
308	Kab. Paser	3.622.500.000
309	Kota Balikpapan	4.567.500.000
310	Kota Bontang	2.362.500.000
311	Kota Samarinda	4.462.500.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	2.887.500.000
313	Kab. Mahakam Ulu	360.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
314	Provinsi Sulawesi Utara	5.175.000.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	4.860.000.000
316	Kab. Minahasa	5.460.000.000
317	Kab. Sangihe	3.517.500.000
318	Kota Bitung	1.500.000.000
319	Kota Manado	2.550.000.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	3.937.500.000
321	Kab. Minahasa Selatan	2.700.000.000
322	Kota Tomohon	3.210.000.000
323	Kab. Minahasa Utara	3.810.000.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3.420.000.000
325	Kota Kotamobagu	2.910.000.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.992.500.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	1.470.000.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	540.000.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.360.000.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	2.760.000.000
331	Kab. Banggai	4.462.500.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	1.470.000.000
333	Kab. Buol	1.260.000.000
334	Kab. Tolitoli	3.202.500.000
335	Kab. Donggala	1.140.000.000
336	Kab. Morowali	2.677.500.000
337	Kab. Poso	4.252.500.000
338	Kota Palu	3.097.500.000
339	Kab. Parigi Moutong	2.730.000.000
340	Kab. Tojo Una Una	840.000.000
341	Kab. Sigi	2.100.000.000
342	Kab. Banggai Laut	1.155.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
343	Kab. Morowali Utara	3.097.500.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	18.690.000.000
345	Kab. Bantaeng	4.110.000.000
346	Kab. Barru	2.992.500.000
347	Kab. Bone	7.860.000.000
348	Kab. Bulukumba	3.832.500.000
349	Kab. Enrekang	4.260.000.000
350	Kab. Gowa	5.910.000.000
351	Kab. Jeneponto	5.010.000.000
352	Kab. Luwu	5.460.000.000
353	Kab. Luwu Utara	4.260.000.000
354	Kab. Maros	4.260.000.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	5.610.000.000
356	Kota Palopo	2.992.500.000
357	Kab. Luwu Timur	4.710.000.000
358	Kab. Pinrang	4.710.000.000
359	Kab. Sinjai	4.560.000.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	3.202.500.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	6.270.000.000
362	Kab. Soppeng	4.710.000.000
363	Kab. Takalar	4.410.000.000
364	Kab. Tana Toraja	3.937.500.000
365	Kab. Wajo	7.620.000.000
366	Kota Parepare	3.060.000.000
367	Kota Makassar	9.210.000.000
368	Kab. Toraja Utara	1.740.000.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.100.000.000
370	Kab. Buton	2.250.000.000
371	Kab. Konawe	4.672.500.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
372	Kab. Kolaka	3.202.500.000
373	Kab. Muna	6.360.000.000
374	Kota Kendari	4.410.000.000
375	Kota Bau-bau	4.710.000.000
376	Kab. Konawe Selatan	4.252.500.000
377	Kab. Bombana	3.450.000.000
378	Kab. Wakatobi	3.150.000.000
379	Kab. Kolaka Utara	2.550.000.000
380	Kab. Konawe Utara	1.380.000.000
381	Kab. Buton Utara	660.000.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	480.000.000
383	Kab. Kolaka Timur	1.950.000.000
384	Kab. Muna Barat	2.400.000.000
385	Kab. Buton Tengah	2.250.000.000
386	Kab. Buton Selatan	600.000.000
387	Provinsi Bali	2.100.000.000
388	Kab. Badung	4.110.000.000
389	Kab. Bangli	1.950.000.000
390	Kab. Buleleng	7.170.000.000
391	Kab. Gianyar	4.110.000.000
392	Kab. Jembrana	3.660.000.000
393	Kab. Karangasem	1.950.000.000
394	Kab. Klungkung	3.510.000.000
395	Kab. Tabanan	5.160.000.000
396	Kota Denpasar	3.810.000.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.110.000.000
398	Kab. Bima	5.310.000.000
399	Kab. Dompu	3.510.000.000
400	Kab. Lombok Barat	7.020.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
401	Kab. Lombok Tengah	6.360.000.000
402	Kab. Lombok Timur	6.960.000.000
403	Kab. Sumbawa	5.910.000.000
404	Kota Mataram	3.810.000.000
405	Kota Bima	1.200.000.000
406	Kab. Sumbawa Barat	3.510.000.000
407	Kab. Lombok Utara	3.360.000.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.410.000.000
409	Kab. Alor	2.910.000.000
410	Kab. Belu	2.370.000.000
411	Kab. Ende	4.252.500.000
412	Kab. Flores Timur	3.937.500.000
413	Kab. Kupang	1.560.000.000
414	Kab. Lembata	2.677.500.000
415	Kab. Manggarai	4.147.500.000
416	Kab. Ngada	2.190.000.000
417	Kab. Sikka	4.357.500.000
418	Kab. Sumba Barat	1.890.000.000
419	Kab. Sumba Timur	4.042.500.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	3.150.000.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	2.910.000.000
422	Kota Kupang	2.887.500.000
423	Kab. Rote Ndao	2.070.000.000
424	Kab. Manggarai Barat	3.937.500.000
425	Kab. Nagekeo	840.000.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	540.000.000
427	Kab. Sumba Tengah	540.000.000
428	Kab. Manggarai Timur	1.560.000.000
429	Kab. Sabu Raijua	1.710.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
430	Kab. Malaka	2.370.000.000
431	Provinsi Maluku	4.110.000.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	2.130.000.000
433	Kab. Maluku Tengah	6.825.000.000
434	Kab. Maluku Tenggara	3.622.500.000
435	Kab. Buru	3.810.000.000
436	Kota Ambon	3.450.000.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	3.517.500.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	5.010.000.000
439	Kab. Kepulauan Aru	3.150.000.000
440	Kota Tual	2.250.000.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	3.937.500.000
442	Kab. Buru Selatan	2.992.500.000
443	Provinsi Papua	7.710.000.000
444	Kab. Biak Numfor	4.860.000.000
445	Kab. Jayapura	5.010.000.000
446	Kab. Jayawijaya	4.110.000.000
447	Kab. Merauke	5.160.000.000
448	Kab. Mimika	5.160.000.000
449	Kab. Nabire	4.462.500.000
450	Kab. Paniai	2.430.000.000
451	Kab. Puncak Jaya	480.000.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	840.000.000
453	Kota Jayapura	2.100.000.000
454	Kab. Sarmi	1.500.000.000
455	Kab. Keerom	1.500.000.000
456	Kab. Yahukimo	1.920.000.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	1.800.000.000
458	Kab. Tolikara	900.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
459	Kab. Boven Digoel	3.150.000.000
460	Kab. Mappi	1.890.000.000
461	Kab. Asmat	540.000.000
462	Kab. Waropen	1.500.000.000
463	Kab. Supiori	360.000.000
464	Kab. Mamberamo Raya	720.000.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	750.000.000
466	Kab. Yalimo	480.000.000
467	Kab. Lanny Jaya	660.000.000
468	Kab. Nduga	540.000.000
469	Kab. Dogiyai	660.000.000
470	Kab. Puncak	480.000.000
471	Kab. Intan Jaya	420.000.000
472	Kab. Deiyai	660.000.000
473	Provinsi Maluku Utara	2.100.000.000
474	Kab. Halmahera Tengah	720.000.000
475	Kota Ternate	1.800.000.000
476	Kab. Halmahera Barat	3.202.500.000
477	Kab. Halmahera Timur	1.020.000.000
478	Kab. Halmahera Selatan	5.092.500.000
479	Kab. Halmahera Utara	3.727.500.000
480	Kab. Kepulauan Sula	4.110.000.000
481	Kota Tidore Kepulauan	3.660.000.000
482	Kab. Pulau Morotai	3.210.000.000
483	Kab. Pulau Taliabu	735.000.000
484	Provinsi Banten	2.640.000.000
485	Kab. Lebak	6.450.000.000
486	Kab. Pandeglang	5.550.000.000
487	Kab. Serang	4.800.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
488	Kab. Tangerang	8.760.000.000
489	Kota Cilegon	1.350.000.000
490	Kota Tangerang	7.560.000.000
491	Kota Serang	4.560.000.000
492	Kota Tangerang Selatan	4.500.000.000
493	Provinsi Bangka Belitung	1.410.000.000
494	Kab. Bangka	2.992.500.000
495	Kab. Belitung	2.677.500.000
496	Kota Pangkal Pinang	2.677.500.000
497	Kab. Bangka Selatan	2.782.500.000
498	Kab. Bangka Tengah	2.677.500.000
499	Kab. Bangka Barat	2.572.500.000
500	Kab. Belitung Timur	1.770.000.000
501	Provinsi Gorontalo	1.410.000.000
502	Kab. Boalemo	1.260.000.000
503	Kab. Gorontalo	2.310.000.000
504	Kota Gorontalo	2.782.500.000
505	Kab. Pohuwato	1.785.000.000
506	Kab. Bone Bolango	2.205.000.000
507	Kab. Gorontalo Utara	1.680.000.000
508	Provinsi Kepulauan Riau	2.760.000.000
509	Kab. Natuna	2.190.000.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	4.350.000.000
511	Kab. Karimun	3.097.500.000
512	Kota Batam	3.832.500.000
513	Kota Tanjung Pinang	2.467.500.000
514	Kab. Lingga	3.300.000.000
515	Kab. Bintan	3.307.500.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
516	Provinsi Papua Barat	60.000.000
517	Kab. Fak Fak	2.782.500.000
518	Kab. Manokwari	3.307.500.000
519	Kab. Sorong	3.517.500.000
520	Kota Sorong	2.362.500.000
521	Kab. Raja Ampat	3.727.500.000
522	Kab. Sorong Selatan	2.250.000.000
523	Kab. Teluk Bintuni	3.517.500.000
524	Kab. Teluk Wondama	2.362.500.000
525	Kab. Kaimana	2.572.500.000
526	Kab. Maybrat	900.000.000
527	Kab. Tambrau	480.000.000
528	Kab. Manokwari Selatan	525.000.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	600.000.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	1.410.000.000
531	Kab. Majene	1.260.000.000
532	Kab. Mamuju	2.415.000.000
533	Kab. Polewali Mandar	3.832.500.000
534	Kab. Mamasa	1.080.000.000
535	Kab. Pasangkayu	1.680.000.000
536	Kab. Mamuju Tengah	1.155.000.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	1.410.000.000
538	Kab. Bulungan	2.992.500.000
539	Kab. Malinau	3.517.500.000
540	Kab. Nunukan	3.412.500.000
541	Kota Tarakan	2.362.500.000
542	Kab. Tana Tidung	630.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)
	Total	2.164.792.500.000
	Sisa Dana Cadangan	1.476.850.305.806
	Dana Cadangan	3.641.642.805.806

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga

DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001

